

2024

## LAPORAN

# PENGELOLAAN ADUAN MELALUI SP4N-LAPOR





### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### 1. Latar Belakang

Aduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan, keluarga yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintah, atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintah.

Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menindaklanjuti aduan masyarakat.

Pengadu atau pelapor adalah perseorangan atau kelompok yang menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terkait perilaku, pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai.

Teradu atau terlapor adalah pegawai di lingkungan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama atau unit kerja yang diduga melakukan penyimpangan terkait dengan kewenangan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai. Teradu juga bisa perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran, atau dianggap melakukan pelanggaran oleh kelompok masyarakat yang tertentu. Sedangkan pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan atau ketidakpuasan.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan sistem pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Melalui SP4N diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait pelayanan publik karena dapat dilakukan melalui beberapa kanal, yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

### 2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
   Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan
   Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi
- c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 556 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul

### 3. Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat di Kabupaten Bantul selama tahun 2024 serta sebagai bahan masukan pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul tahun berikutnya.

### BAB II PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ADUAN MASYARAKAT

Pada bab ini disampaikan laporan pengelolaan aduan masyarakat di Kabupaten Bantul selama tahun 2024 melalui kanal aduan SP4N-LAPOR! yang secara rinci disampaikan pada sub bab berikut ini.

### 1. Rekap Aduan SP4N-Lapor

No	Tanggal Aduan	Isi Aduan	Status Aduan				
			Belum	Belum	Proses	Selesai	Total
	Addan		Terverifikasi	Ditindaklanjuti	Fioses		
1	04	Laporan terkait talud jalan					
	Januari	ambrol yang berlokasi di	0	0	0	1	1
	2024	Kapanewon Sedayu					
	04	Jalan rusak dan berlubang					
2	Januari	karena longsor yang	0	0	0	1	1
		berlokasi di dekat Gapura					1
	2024	Pelemsewu					
	06	Permohonan penutupan U		0	0	1	
		Turn untuk mengurangi					
3	Januari	intensitas kecelakaan yang	0				1
	2024	berlokasi di jalan Ringroad					
		Selatan UMY – Alma Ata					
	21 Januari 2024	Drainase meluap ketika	0	0	0	1	
4		hujan deras yang berloksi di					1
4		Jalan Ambarbinangun, Utara					1
		Pondok Pemuda					
5	01 Februari 2024	Penyumbatan saluran	0	0	0	1	
		drainase yang menyebabkan					1
		banjir Ketika hujan deras					1
		yang berlokasi di Gang Duku,					



<sup>•</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

<sup>•</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.** 

				T			1
		Jalan IR Juanda Kalurahan					
		Trirenggo					
6	05 Februari 2024	Jalan rusak dan berlubang	0	0	0		
		yang berlokasi di sekitar ruas				1	1
		jalan Maguwo dan Berbah					1
		Kapanewon Banguntapan					
		Jalan rusak dan berlubang					
	19	yang berlokasi di ruas jalan		0			
		Maguwo, ruas jalan					
7	Februari	Wonocatur, area AAU	0		0	1	1
	2024	sampai Pasar Bantengan dan					
		Perempatan Maguwo					
		sampai RSPAU Hardjolukito					
	26 Februari 2024	Jalan rusak dan berlubang di	0	0	0	1	
8		ruas jalan Samas depan					4
		Puskesmas Bambanglipuro					1
		Kapanewon Bantul					
	28 Februari 2024	Jalan rusak dan berlubang	0	0	0	1	
		yang berlokasi di ruas Jalan					1
9		Pleret, Wirokerten,					1
		Kapanewon Banguntapan					
	02 Maret 2024	Jalan rusak dan berlubang		0	0	1	
10		yang berlokasi di ruas jalan					1
10		Garuda, Gatak, Tamantirto,	0				1
		Kapanewon Kasihan					
	17	Jalan rusak dan berlubang					
11	Maret	yang berlokasi di ruas jalan	0	0	0	1	1
	2024	Samas					
12	23	Jalan rusak dan berlubang					
	Maret	yang berlokasi di	0	0	0	1	1
	2024	perempatan Druwo, Jalan					
		<u> </u>					



<sup>•</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

		Davagatuitia ka ayah utaya					
		Parangtritis ke arah utara					
		dan ruas jalan Imogiri barat,					
		perempatan Wojo ke arah					
		selatan					
	27	Jalan rusak dan berlubang					
13	Maret	yang berlokasi di ruas jalan	0	0	0	1	1
	2024	Pleret					
	28	Jalan rusak dan berlubang					
14	Maret	yang berlokasi di ruas jalan	0	0	0	1	1
	2024	Blok O Janti ke arah Paskhas					
	02	Jalan rusak dan berlubang					
15		yang berlokasi di ruas jalan	0	0	0	1	1
15	April	Kemusuk – Sawo,					1
	2024	Kapanewon Sedayu					
		Tutup gorong-gorong jalan					
	05	ambles yang berlokasi di	0	0	0	1	
16	April	jalan Bugisan selatan					1
	2024	Jomegatan, Ngestiharjo,					
		Kapanewon Kasihan					
	22	Jalan rusak dan berlubang					
17	April	yang berlokasi di sisi jalan	0	0	0	1	1
	2024	selatan perempatan Sedayu					
	03	Jalan rusak dan berlubang					
18	Mei	yang berlokasi di atas	0	0	0	1	1
	2024	Jembatan Potorono					
		Jalan belum diaspal dan					
	06	masih berlandaskan tanah	0	0	0	1	
19	Mei	yang berlokasi di jalan yang					1
	2024	melintasi jembatan Kali					
		Pleretan, Klampok					



<sup>•</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

20	29 Mei 2024	Jalan rusak dan berlubang yang berlokasi di sepanjang jalan dari pertigaan Sugito	0	0	0	1	
							1
		Elektronik ke barat jalan					
		Glagah Kidul sampai dengan					
		pertigaan Pak Sabar Belut					
		Jalan rusak dan					
	04	bergelombang yang berloksi					
21	Juni	di ruas jalan Mahoni, ruas	0	0	0	1	1
	2024	jalan Akasia, ruas jalan	· ·				-
	2024	Sugeng Riyadi dan ruas Jalan					
		Ki Ageng Giring					
	18 Juni	Jalan rusak dan berlubang	0	0	0	1	
22		yang berlokasi di ruas jalan					1
	2024	Parangtritis					
	29 Juli 2024	Lapisan Dam yang berada di	0	0	0	1	
22		Bendungan Srandakan					
23		runtuh vdan dikhawatirkan					1
		akan ambrol					
	12 Agustus 2024	Jalan rusak dan berlubang	0	0	0	1	
24		yang berlokasi di sepanjan					1
		ruas jalan Imogiri Barat					
	27 Agustus 2024	Tuntutan Ganti rugi dalam		0	0	1	
2-		penataan Kawasan Kumuh	0				
25		yang berlokasi di sepanjang					1
		Sungai Gajah Wong					
26	03 Oktober 2024	Jalan rusak dan berlubang	0	0	0	1	
		yang berlokasi di ruas jalan					1
		Glondong, Argomulyo					



<sup>•</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

<sup>•</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.** 

	07	Jalan rusak dan belubang					
27	Oktober	yang berlokasi di ruas jalan	0	0	0	1	1
	2024	Maguwo					
	14	Jalan rusak dan berlubang					
28	November	yang berlokasi di depan	0	0	0	1	1
	2024	Masjid Sultan Agung					
Total Aduan Melaui SP4N-Lapor						28	

### 2. Grafik Rekapitulasi Aduan SP4N-Lapor



### 3. Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Aduan Masyarakat

Dari data diatas, diperoleh aduan Masyarakat melalui kanal aduan SP4N-Lapor sebanyak 36 Laporan. Dengan semua aduan telah terverifikasi selesai sebanyak 36 Laporan. Aduan terbanyak adalah tentang kerusakan jalan raya. Aduan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan survey lokasi jalan rusak, kemudian melakukan perbaikan berupa pengaspalan maupun penambalan jalan.

Evaluasi dan koordinasi selalu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan pengaduan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

<sup>•</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

### BAB III

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan Pengelolaan Aduan Masyarakat telah dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan tahun berikutnya. Berdasarkan evaluasi pengelolaan aduan Masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, diperoleh rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- 1. Memotivasi pengelola aduan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang belum menindaklanjuti aduan tepat waktu.
- 2. Memberikan masukan kepada seluruh staff di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul agar lebih menyadari pentingnya aspirasi dan aduan masyarakat untuk menentukan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Mengetahui Plt. Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul



JIMMY ALRAN MANUMPAK SIMBOLON, SE,M.Si NIP. 197906122002121002